

Pengaruh IPM Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Jawa Tengah

Ade Kamilatu Tarida¹, Bayu Nurhadi²
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
Email : adekamila18@gmail.com

Citation: Tarida, A.K', & Nurhadi, B. (2024). Pengaruh IPM Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Jawa Tengah. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 4(4), 511–522.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/341>

Received: 22 Juli 2024

Accepted: 13 Agustus 2024

Published: 31 Agustus 2024

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

This research aims to find out how the Human Development Index (HDI) and minimum wage relate to poverty with ZIS as a moderate variable in Central Java Province in 2018-2023. This research uses quantitative methods with secondary data taken from the BPS and BAZNAS website. The data used is combined panel data from time series data from 2018-2023 and cross section data from 35 districts/cities in Central Java Province with sampling using a saturated sampling technique. The data analysis tool used is Eviews 10. The research results show that HDI has a negative and significant influence on poverty, while the minimum wage has a positive and significant influence on poverty. Meanwhile, the ZIS variable is unable to moderate the relationship between HDI and minimum wages on poverty in Central Java Province in 2018-2023.

Keywords: HDI; Poverty; minimum Wage; ZIS.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upah minimum terhadap kemiskinan dengan ZIS sebagai variabel moderating di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari website BPS dan BAZNAS. Data yang digunakan yakni data panel gabungan dari data time series dari tahun 2018-2023 dan data cross section dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Alat analisis data yang digunakan yakni menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel ZIS tidak mampu memoderating hubungan IPM dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Kata Kunci: IPM; Kemiskinan; Upah Minimum; ZIS.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini dapat didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi beberapa orang atau sekelompok orang dibandingkan dengan standar hidup umum dalam masyarakat yang bersangkutan (Purboningtyas et al., 2020). Dimensi kemiskinan merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat kesempatan bagi masyarakat. hal ini mencakup dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi akses seseorang yang berkategori miskin untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraannya (Pratiwi et al., 2022). Berikut tabel jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah 2018-2023 :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tahun	Kemiskinan	
	Persentase	Ribuan Jiwa
2018	11,32%	3897,20
2019	10,80%	3743,23
2020	11,41%	3980,90
2021	11,79%	4109,75
2022	10,93%	3831,44
2023	10,77%	3791,50

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018-2023 angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan yang semula 11,32% menjadi 10,77%. Namun pada tahun 2019-2021 angka kemiskinan kembali meningkat sekitar 1%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berkelanjutan yang mungkin akan berdampak pada perubahan perilaku dan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan angka kemiskinan. melihat di Provinsi Jawa Tengah angka kemiskinan berada di peringkat ketiga, maka hal ini harus segera ditangani dan ditanggulangi secara bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Suharto, (2014) kedua indikator kemiskinan ini akan berkaitan dengan teori neoliberalisme dan demikrasi sosial, dimana teori neoliberalisme menyatakan bahwa komponen terpenting dalam masyarakat adalah kebebasan individu berdasarkan ilmu ekonomi klasik, seperti yang diutarakan oleh Smith, (1776) dan Hayek, (1944) yang menekankan prinsip *laissez faire* dengan mekanisme pasar bebasnya. Hal ini menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah individual yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh individu yang bersangkutan. Jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya, pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia di pacu setinggi-tingginya, maka hal ini mampu untuk menanggulangi kemiskinan.

Di sisi lain, kemiskinan dipandang oleh teori demokrasi sosial sebagai masalah struktural dan bukan masalah individu dalam masyarakat. ketidakstabilan dan ketimpangan dalam masyarakat akan menyebabkan tersumbatnya bagi kelompok tertentu untuk mengakses sumber daya yang ada. Landasan teori ini adalah ekonomi permintaan dan ekonomi campuran yang melibatkan strategi untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan dana, wawasan dan keberlanjutan yang bersifat residual (Cheyne et al., 1998).

Dengan demikian, dari kedua teori ini menyatakan bahwa kemiskinan, baik yang disebabkan oleh masalah individual maupun struktural di kalangan masyarakat dapat ditanggulangi melalui strategi pemberdayaan dana, perluasan pasar usaha, peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (yang tercermin dalam peningkatan IPM dan upah minimum).

Pembangunan manusia merupakan upaya menciptakan pembangunan bagi sektor lain. Indikator efektivitas pembangunan manusia yang dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam bekerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masyarakat akan kurang produktif dalam bekerja jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Jumlah penduduk miskin akan meningkat akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja (Endar Wati, 2016). Berikut tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 :

Tabel 2. IPM Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tahun	IPM (%)
2018	71,12%
2019	71,73%
2020	71,82%
2021	72,16%
2022	72,79%
2023	73,39%

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,12% dan seterusnya mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023 yang mendapat nilai 73,39%. Dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) angka kemiskinan pada tahun 2023 turun dan menunjukkan angka 10,77% jumlah penduduk miskin.

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator dalam kemiskinan, upah minimum juga sesuatu hal yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, serta sub-sektoral. Dengan hal ini upah minimum juga dapat diartikan sebagai upah pokok dan upah tunjangan. Upah minimum yang tinggi mengakibatkan permintaan daya beli mereka juga akan bertambah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan semangat kerja dan mampu meningkatkan efektivitas kerja mereka (Rusniati et al., 2018). Berikut tabel upah minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 :

Tabel 3. Upah Minimum Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tahun	Upah Minimum (Ribuan Jiwa)
2018	59017925,81
2019	63853809,13
2020	69327461,15
2021	71452654
2022	71845833
2023	76949689

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa upah minimum di Jawa Tengah tahun 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 upah minimum di Provinsi Jawa Tengah sekitar 59 ribu dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023 sekitar 76 ribu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dari Hanifah, (2021) menjelaskan bahwa meningkatnya upah minimum juga tidak bisa dikatakan mampu untuk merendahkan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dalam biaya

kehidupan yang layak untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang bekerja. Upah minimum merupakan sumber pemasukan, apabila sumber pemasukan turun maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Dimana variabel uang mampu untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen merupakan pengertian dari variabel moderating itu sendiri (Liana, 2009). Zakat merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Soleh, 2021). Kata *zaka yazku* yang berarti keberkahan (*barakah*), pertumbuhan (*nama'*), kesucian (*thaharah*), dan kebijakan (*ash salahu*) merupakan pengertian dari zakat secara etimologi (Ridlo, 2017).

Infaq berawal dari kata *anfaqo-yunfiqu*, yang berarti mengeluarkan atau membiayai. Makna infaq bisa saja berubah jika dikaitkan dengan upaya untuk menjalankan perintah dari Allah SWT. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan infaq sebagai pengeluaran harta yang termasuk zakat dan non zakat. Sedangkan kata “shadaqah” sendiri berasal dari istilah Arab “ash-shadaqah” yang berarti memberi sesuai sunnah. Sebaliknya, shadaqah adalah memberi tanpa mengukur apapun dengan harapan mendapat balasan dari Allah SWT. Memberi uang kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun disebut shadaqah. Umat islam yang memiliki kekayaan luar biasa wajib melakukan kewajiban bershadaqah (Zulkifli, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) mampu untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta mampu untuk menanggulangi kemiskinan jika dikelola dengan benar.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati (2016) dan Wididarma (2021) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian penelitian dari Prasetya (2017) dan Wenagama (2020) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2022) dan Amiroh (2022) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. selanjutnya penelitian mengenai upah minimum yang diteliti oleh Umiyati (2018) menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, penelitian dari Ikhsan (2018) dan Hanifa (2021) menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. sedangkan menurut Panjaitan (2020), Yoga et al., (2022) dan Ningsih (2023) menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin (2020) menjelaskan bahwa zakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan untuk memoderating kemiskinan. Kemudian penelitian dari Amri (2020) menjelaskan bahwa zakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan untuk memoderating kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Madania (2023) menjelaskan bahwa ZIS memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan atau tidak mampu memoderating Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2020) menjelaskan bahwa ZIS memiliki pengaruh positif dan signifikan atau mampu memoderating Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan.

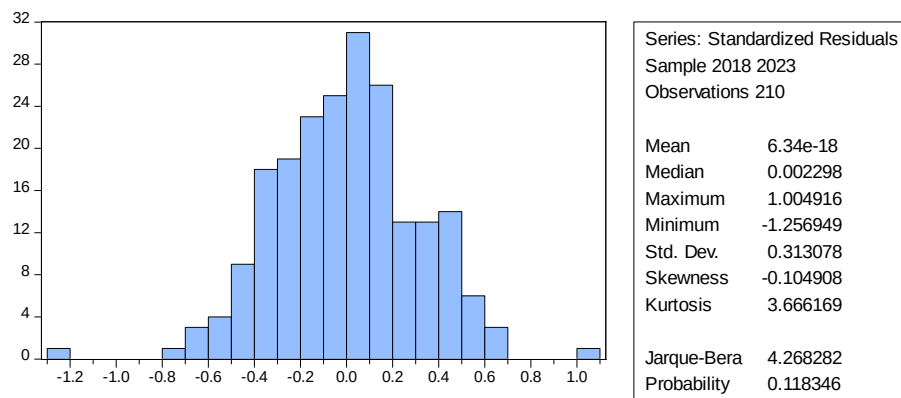
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa ada perbedaan (*research gap*) mengenai apa saja yang mampu mempengaruhi kemiskinan dan rujukan mengapa memilih di Provinsi Jawa Tengah, maka dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh IPM dan Upah Minimum Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan jenis data sekunder. Dimana sumber data pada penelitian ini didapat dari BPS dan BAZNAS. Penelitian ini menggunakan persamaan uji regresi linear berganda dengan penambahan variabel moderating. Data yang digunakan yakni data pabel gabungan dari data *time series* dari tahun 2018-2023 dan data *cross section* dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa uji normalitas memiliki nilai Jarque-Bera sebesar 4.268282 dengan nilai probabilitas sebesar $0.118346 > 0,05$ yang artinya penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 08/07/24 Time: 13:51
Sample: 1 210
Included observations: 210

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7.527938	277.1570	NA
IPM_X1	0.001710	335.6055	1.240278
UPAH_MINIMUM_X2	5.77E-13	83.41763	1.417373
X1Z	1.06E-34	7.030474	3.117265
X2Z	1.36E-43	7.821340	3.410324

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai VIF dari semua variabel < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES

Method: Panel Least Squares

Date: 08/26/24 Time: 15:51

Sample: 2018 2023

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.362988	2.441872	0.967695	0.3346
IPM_X1	-0.032031	0.037884	-0.845497	0.3990
UPAH_MINIMUM_X2	1.28E-07	1.88E-07	0.683342	0.4953
X1Z	6.43E-19	8.74E-19	0.736352	0.4625
X2Z	-6.05E-23	3.75E-23	-1.612327	0.1087

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.275985	Mean dependent var	0.244336
Adjusted R-squared	0.115092	S.D. dependent var	0.195019
S.E. of regression	0.183453	Akaike info criterion	-0.387728
Sum squared resid	5.755026	Schwarz criterion	0.233877
Log likelihood	79.71147	Hannan-Quinn criter.	-0.136436
F-statistic	1.715338	Durbin-Watson stat	2.638456
Prob(F-statistic)	0.010896		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas $> 0,05$ yang artinya penelitian yang dilakukan terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.343563	Prob. F(2,202)	0.7097
Obs*R-squared	0.708527	Prob. Chi-Square(2)	0.7017

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/26/24 Time: 19:52

Sample: 2 210

Included observations: 209

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.034818	2.004056	0.017374	0.9862
IPM_X1	0.000718	0.032249	0.022270	0.9823
UPAH_MINIMUM_X2	-4.90E-08	9.14E-07	-0.053647	0.9573
X1Z	-4.97E-14	4.01E-12	-0.012409	0.9901
X2Z	2.74E-18	1.48E-16	0.018478	0.9853
RESID(-1)	-0.054742	0.070605	-0.775338	0.4390
RESID(-2)	0.017858	0.071339	0.250325	0.8026

R-squared	0.003390	Mean dependent var	1.03E-15
Adjusted R-squared	-0.026212	S.D. dependent var	1.684300

S.E. of regression	1.706232	Akaike info criterion	3.939371
Sum squared resid	588.0678	Schwarz criterion	4.051315
Log likelihood	-404.6642	Hannan-Quinn criter.	3.984630
F-statistic	0.114521	Durbin-Watson stat	2.001012
Prob(F-statistic)	0.994647		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar $0.7017 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji regresi linear berganda dilakukan apabila data yang sudah diteliti bersifat stasioner. Setelah data tersebut memenuhi uji stasioner maka langkah selanjutnya yakni memilih model uji regresi yang tepat dengan cara spesifikasi model regresi. Dari hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang terpilih.

Tabel 7

Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: KEMISKINAN_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/07/24 Time: 11:21

Sample: 2018 2023

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.76726	4.607073	13.18999	0.0000
IPM_X1	-0.766553	0.071476	-10.72466	0.0000
UPAH_MINIMUM_X2	2.96E-06	3.54E-07	8.352290	0.0000
X1Z	4.69E-19	1.65E-18	0.284603	0.7763
X2Z	6.05E-23	7.07E-23	0.855589	0.3934

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991588	Mean dependent var	10.78571
Adjusted R-squared	0.989719	S.D. dependent var	3.413516
S.E. of regression	0.346121	Akaike info criterion	0.881927
Sum squared resid	20.48574	Schwarz criterion	1.503533
Log likelihood	-53.60237	Hannan-Quinn criter.	1.133220
F-statistic	530.4471	Durbin-Watson stat	1.774962
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil uji model *Fixed Effect Model* (FEM) yaitu sebagai berikut :

Kemiskinan = $60.76726 - 0.766553 \text{ IPM} + 2.96\text{E-}06 \text{ Upah Minimum} + 4.69\text{E-}19 \text{ IPM} \cdot \text{ZIS} + 6.05\text{E-}23 \text{ Upah Minimum} \cdot \text{ZIS}$.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan

Hasil uji di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari variabel IPM yakni sebesar -0.766553 dengan nilai probabilitasnya 0.0000, yang artinya hasil Prob. $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Upah minimum terhadap kemiskinan.

Hasil uji di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari variabel upah minimum yakni sebesar $2.96E-06$ dengan nilai probabilitasnya 0.0000 , yang artinya hasil nilai Prob. $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan yang dimoderating oleh ZIS.

Hasil uji di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar $4.69E-19$ dengan nilai probabilitasnya 0.7763 , yang artinya hasil nilai prob. $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 setelah dimoderating oleh ZIS.

Upah minimum terhadap kemiskinan yang dimoderating oleh ZIS

Hasil uji di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien $6.05E-23$ dengan nilai probabilitasnya 0.3934 , yang artinya hasil nilai prob. $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 setelah dimoderating oleh ZIS.

Berdasarkan hasil uji *Fixed Effect Model* (FEM) yang dilakukan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai prob(F-statistik) sebesar $0.000000 < 0,05$, yang artinya hal tersebut menunjukkan variabel Indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum dan ZIS sebagai variabel moderating berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil uji *Fixed Effect Model* (FEM) pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-square sebesar 0.989719 atau $98,97\%$, yang artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum, dan zakat dapat memberikan pengaruh terhadap kemiskinan sebesar $98,97\%$ dan sisanya dijelaskan dengan variabel lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Dari hasil uji T dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel IPM adalah negatif sebesar -0.766553 dengan nilai probabilitasnya 0.0000 yang artinya nilai Prob. $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni H1 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wididarma (2021) dan Wati (2016) yang menjelaskan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenagama (2020) yang menjelaskan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan berbasis pengembangan dan peningkatan akses pendidikan, kesehatan serta dalam mendukung kehidupan yang lebih layak dapat efektif menurunkan tingkat kemiskinan.

Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Dari hasil uji T dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi upah minimum adalah positif sebesar $2.96E-06$ dengan nilai probabilitasnya 0.0000 yang artinya nilai Prob. $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni H2 ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2017) yang menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2018) dan Hanifah (2021) yang menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam hal ini, angka kemiskinan tidak serta merta menurun seiring dengan kenaikan upah minimum. Di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang upah minimum disetiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Namun peningkatan ini tidak

berarti dapat menurunkan angka kemiskinan. inflasi terjadi seiring dengan kenaikan harga produk yang dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum. Akibatnya harga akan berubah dan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan taraf hidup yang lebih baik dan juga akan mengalami peningkatan angka kemiskinan.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat memoderating Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan.

Dari hasil uji T dapat diketahui bahwa IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan setelah dimoderating oleh ZIS. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar $4.69E-19$ dengan nilai probabilitasnya $> 0,05$ sebesar 0.7763 yang artinya variabel ZIS tidak mampu memoderating IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madania (2023) yang menjelaskan bahwa ZIS tidak mampu memoderating IPM terhadap kemiskinan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2020) yang menjelaskan bahwa ZIS mampu memoderating IPM terhadap kemiskinan. Dalam hal penghimpunan dana ZIS belum berfungsi secara maksimal. Selain itu, pertukaran uang ZIS terutama ditunjukkan untuk keperluan konsumtif. Oleh karena itu, dana ZIS kurang mampu untuk meningkatkan produktifitas dan kapasitas masyarakat dalam mencapai tiga aspek fundamental pembangunan manusia yakni kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat memoderating upah minimum terhadap kemiskinan.

Dari hasil uji T dapat diketahui bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan setelah dimoderating oleh ZIS. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar $6.05E-23$ dengan nilai probabilitasnya $> 0,05$ sebesar 0.3934 yang artinya variabel ZIS tidak mampu memoderating upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Dengan demikian ZIS memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, tetapi tidak secara langsung memoderating upah minimum. Meskipun ZIS dapat memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang terkena dampak kemiskinan, namun upah minimum dan kebijakan ketenagakerjaan lebih berkaitan dengan perlindungan sosial dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farida, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan berbasis pengembangan dan peningkatan akses pendidikan, kesehatan serta dalam mendukung kehidupan yang lebih layak dapat efektif menurunkan tingkat kemiskinan.

Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dalam hal ini, angka kemiskinan tidak serta merta menurun seiring dengan kenaikan upah minimum. Di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang upah minimum disetiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Namun peningkatan ini tidak berarti dapat menurunkan angka kemiskinan. inflasi terjadi seiring dengan kenaikan harga produk yang dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum. Akibatnya harga akan berubah dan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan taraf hidup yang lebih baik dan juga akan mengalami peningkatan angka kemiskinan.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) tidak bisa memoderating pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dalam hal penghimpunan dana ZIS belum berfungsi secara maksimal. Selain itu, pertukaran uang ZIS terutama ditunjukkan untuk keperluan konsumtif. Oleh karena itu, dana ZIS kurang mampu untuk meningkatkan produktifitas dan kapasitas masyarakat dalam mencapai tiga aspek fundamental pembangunan manusia yakni kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) tidak bisa memoderating pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dengan demikian ZIS memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, tetapi tidak secara langsung memoderating upah minimum. Meskipun ZIS dapat memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang terkena dampak kemiskinan, namun upah minimum dan kebijakan ketenagakerjaan lebih berkaitan dengan perlindungan sosial dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

Saran yang dapat diberikan setelah mengetahui hasil penelitian dan kesimpulan diatas yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya mencoba untuk menjadikan variabel ZIS sebagai variabel independen atau dependen serta diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan untuk dijadikan pembanding agar mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroh. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Banten Periode Tahun 2018-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 44–59. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.187>
- Amri, K. (2020). Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Al-Muzara'Ah*, 7(2), 57–70. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.57-70>
- Cheyne, C., Belgrave, M., & O'Brien, M. (1998). Social Policy in Aotearoa New Zealand. *Social Policy Journal of New Zealand*, 25, 170–174. https://books.google.co.id/books/about/Social_Policy_in_Aotearoa_New_Zealand.html?id=g_vZAAAAMAAJ&pgis=1
- Endar Wati, A. S. (2016). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN. *Jurnal Ecodunamika*, 147(March), 11–40.
- Estrada, A. A. E., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 9(2), 233–261.
- Farida, A. U. (2023). PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA (UMK) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP DENGAN ZAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Skripsi*.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191–206. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>
- Hayek, F. . (1944). *THE ROAD TO SERFDOM*.
- Ihsan, K., & Ikhsan. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(3), 408–419. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/8950/0>
- Inayah, N. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2014-2019 Dengan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Sebagai Varibel Moderasi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Salatiga*, 1689–1699.
- Kristianto, D., & Prasetya, B. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk , IPM , dan TPT terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter dan Multidimensi) di Indonesia*. October. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22675.99367>
- Liana, L. (2009). Mra Dengan Spss. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, XIV(2), 90–97.
- Mangasi Panjaitan. (2020). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 3(1), 104–108. <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/jpmikp/article/view/1357#>
- Muttaqin, A. A., & Safitri, A. (2020). Analisis Pengaruh Zakat dan Infak Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan dan Gini Rasio di Indonesia Tahun 2007-2018. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 51 – 61.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Ningsih, M. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362–372.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Purboningtyas, I., Sari, R., Guretno, T., Dirgantara, A., Dwi, A., & Al Haris, M. (2020). Analysis Of The Influence Of Open Unemployment Levels And Human Development Index On Poverty In Central Java Province. *Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(1), 81–88. www.jateng.bps.go.id
- Ridlo, M., & Sari, F. I. (2017). Analisis Pengaruh Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Di Pulau Jawa Periode Tahun 2012-2017). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'Ah*, 1–17.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4439>
- Rusniati, R., Sudarti, S., & Agustin, A. F. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 34. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7232>
- Siti Madania, Z. M. (2023). *Can Economic Growth, HDI, and ZIS Contribute to Poverty Reduction In South Kalimantan*. *Jurnal Ecodemica*. 7(1), 136–146.
- Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, 62–72. <https://doi.org/10.2307/2221259>
- Soleh, M., & Wahyuni, N. (2021). Pengaruh IPM, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Zakat Sebagai Moderating. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(2), 86–106. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>

- Suharto, E. (2014). *MASYARAKAT foerdayakan Mem bang un Masyarakat*.
- Surabaya, K., & Pratiwi, N. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah terhadap Kemiskinan di Karesidenan Surabaya Tahun 2015-2020. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 13–23. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.10041>
- Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(7), 2982–3010.
- Yoga, I. M. S., Putra, I. K. T. E., & Utomo, R. B. (2022). Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Sutasoma*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i1.179>
- Zulkifli. (2020). *PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF, dan PAJAK*.